

SILPA SUMUT CAPAI RP500 M



Sumber gambar: harian 88.com

Medan, (Analisa). Plt Gubsu, Tengku Erry Nuradi mengaku, hasil rapat koordinasi SKPD Pemprov Sumut ditemukan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun 2015 mencapai Rp500 miliar. Bahkan, ada SKPD yang penyerapan anggarannya berkisar 75 persen.

“Rata-rata serapan APBD sudah 94 persen, tapi masih ada yang berkisar 75 persen. Untuk silpa tahun 2015 itu berkisar Rp500 miliar,” ujar Plt Gubsu, Tengku Erry Nuradi di ruangannya, Senin (1/4).

Begitu pun, dia menyebutkan, angka pasti silpa masih menunggu audit BPK Sumut. “Kalau pastinya nanti bisa dilihat dalam audit BPK, kalau sekarang memang masih ada yang belum sinkron di antara SKPD,” terangnya.

Soal serapan anggaran, SKPD yang terbesar yakni Sekretariat DPRD Sumut sebesar 98 persen. Sementara yang kecil adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Sumut sebesar 74 persen, Dinas Perikanan Sumut 75 persen juga Disdik Sumut 75 persen.

Termasuk serapan anggaran operasional Gubsu dan Wakil Gubsu, 74 persen. “Karena selama enam bulan ini Gubsu non aktif Gatot Pujo Nugroho tidak diberikan lagi dana operasional, namun gaji tetap dibayarkan,” jelas Erry.

Menurutnya, SKPD yang serapan anggarannya rendah tersebut karena ada dana DAK yang tidak sempat direalisasikan karena waktu PAPBD yang lamban, juga banyaknya

kekhawatiran dari pimpinan SKPD terhadap kasus-kasus hukum yang menjerat pimpinan SKPD lainnya. “Persoalan hukum ini memang menjadi kendala realisasi anggaran di samping lambannya PAPBD. Namun kita yakin tahun ini di bulan Juni nanti target kita PAPBD 2016 sudah kita usulkan ke DPRD,” jelas Erry.

Menanggapi masih tingginya silpa Sumut tahun 2015, pengamat anggaran Elfenda Ananda mengatakan hal ini jelas akan merugikan bagi masyarakat, karena dengan banyaknya silpa maka tidak terserap terhadap pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat.

“Dengan banyaknya silpa maka realisasi pembangunan terkendala dan ini merugikan masyarakat yang harusnya dapat menikmati langsung manfaat dari pembangunan tersebut,” kata Elfenda.

Di sisi lain, lanjut dia kalau serapan anggaran masih ada yang berkisar 75 persen SKPD nya patut dievaluasi. “Ini perlu dievaluasi, apakah tidak mampu mengelola anggaran atau memang ada kendala yang dihadapi.

Patut dipertanyakan kepala dinasny. Kalau tidak mampu harus segera diganti dengan yang lebih mampu,” ujar Elfendi. **(nai)**

Sumber Berita:

1. Harian Analisa, Gubsu Akui Silpa Sumut Lebih Rp500 M, Selasa, 10 Januari 2017.
2. Harian Waspada, Silpa Diprediksi Lebih Rp500 M Rabu, Selasa 10 Januari 2017.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Pasal 1 angka 55

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 62

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dan perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah,

pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dan kegiatan lanjutan.

Pasal 137

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. Menutupi deficit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;*
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;*
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.*